

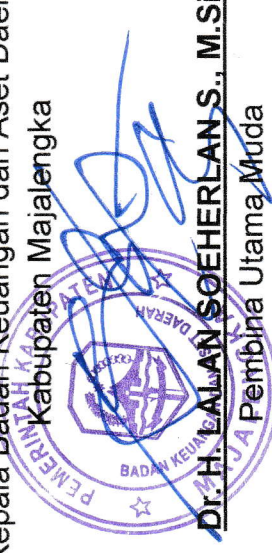
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
BADAN PUBLIK BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Penyimpanan
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 66	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
3	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
4	SPJ, SPM, SPP, SP2D, SP3B, DPA	UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Selama 1 tahun anggaran
5	Rincian anggaran kegiatan	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
6	Penetapan kinerja	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama periode
7	Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama Undang-undang berlaku

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Penyimpanan
			Dibuka	Ditutup	
8	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9	Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya	Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar pihak ketiga	Menjaga kondusifitas kerjasama	Selama proses kerjasama
10	Rincian RKA dan DPA Seluruh OPD pada lampiran Perda Perbup	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
11	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Data Dapat Disalahgunakan	Menjaga Keamanan Data	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
12	LKPD Unaudit	UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Data yang dapat berubah sebelum audit BPK	Penetapan data yang lebih akurat	Selama proses menjadi audited

Majalengka, 28 Mei 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011